

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut demokrasi-Pancasila, dianutnya keterbukaan yang bertanggung jawab menjadikan warga negara Indonesia dituntut berperan aktif dan ikut serta dalam menjalankan roda kenegaraan. Dalam hal ini, banyak unsur yang harus diperhatikan dalam menjadikan warga negara dapat ikut serta dan berperan aktif dalam pemutusan kebijakan.

Salah satu yang dapat mendukung keaktifan dan keikutsertaan warga negara sendiri adalah ketersediaan wadah berkumpul bagi para warga. Sesuai dengan bunyi Pasa1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, semua aktivitas kenegaraan di Indonesia haruslah bersumber dari hukum. Dimana, hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila sebagai Norma dasar. Karena Indonesia merupakan Negara yang menganut demokrasi-pancasila, maka dari itu dianut keterbukaan yang bertanggung jawab.

Abdulkarim (2012, hlm.31) menyatakan Demokrasi Pancasila menghendaki suatu pemertintahan yang benar-benar menjunjung tinggi hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dengan demikian, segala tindakan atau kebijaksanaan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Pernyataan Abdulkarim tersebut menyotroti Demokrasi Pancasila dari segi Pemerintahan Berdasarkan Hukum, sementara jika ditilik dari sisi warga Negara Indonesia, kita dituntut berperan aktif dan ikut serta dalam menjalankan roda kenegaraan. Dalam hal ini, banyak unsur yang harus diperhatikan dalam menjadikan warga negara dapat ikut serta dan berperan aktif, salah satunya adalah ketersediaan ruang publik untuk menjembatani keaktifan dan partisipasi warga negara sendiri.

Ruang publik dalam konsep masyarakat madani dikenal dengan istilah *free public sphere*. *Free public sphere* seharusnya sudah tersedia dalam setiap lingkungan yang ada di sudut-sudut negara, baik itu lingkungan masyarakat luas maupun secara kelembagaan. Abdulkarim (2006, hlm.34-35) mengatakan bahwa dalam masyarakat madani ada yang menekankan pada ruang (*space*), dimana individu dan kelompok dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi.

Didalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik suatu negara.

Free Public Sphere sendiri merupakan sebuah teori yang masih baru digagas oleh Habermas (1989) menyatakan bahwa “*Public Sphere* adalah tempat masyarakat beraktivitas seperti bercakap-cakap mengenai kritik yang rasional untuk diinformasikan sebagai opini publik, yang harus dikemukakan, dan secara demokratis membuat keputusan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan.”(hlm.3).

Ketersediaan *free public sphere* di lingkungan masyarakat luas biasa ditemui maupun diwadahi oleh berbagai organisasi maupun kelembagaan non-pemerintahan atau dikenal juga dengan sebutan *Non Governmental Organization* yang disingkat menjadi NGO. Keberadaan NGO bisa dikategorikan sesuai dengan fungsi dan tujuan dari organisasi atau lingkungan masyarakat sendiri. Dalam lingkungan masyarakat, NGO sudah menjadi *free public sphere* bagi anggota maupun melakukan diskusi terbuka bagi umum.

Kecenderungan lingkungan masyarakat selalu bersifat umum dan tidak dikhususkan pada pendidikan ataupun segmentasi, padahal bagus kiranya jika disetiap lembaga pendidikan memiliki *free public sphere* untuk mewadahi berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pelajar atau mahasiswa, kegunaan *free public sphere* di lingkungan kampus pada khususnya bisa dijadikan sebuah fasilitas untuk mahasiswa menyadari akan peran dan fungsi dari mahasiswa sendiri.

Keberadaan mahasiswa sekarang seakan sudah luput akan kesibukan akademik tanpa menyadari peran dan fungsinya. Banyak faktor yang dapat melatar belakangi mengapa mahasiswa sekarang tidak dapat bergerak semasif sebelumnya, bisa jadi dikarenakan keterbatasan ruang gerak bebas yang menjadikan mahasiswa tidak semasif dulu pegerakannya. Bahkan, dalam sebuah artikel yang berjudul “Masalah Mahasiswa dan Sosial” menyatakan ada permasalahan yang segera perlu diatasi, masalah yang cenderung melekat pada diri mahasiswa yang terkait dengan rendahnya motivasi, konsep diri, etos belajar, ekspektasi, dan rendahnya daya juang mahasiswa.

Maulida (2014) dalam artikelnya yang berjudul “Mahasiswa dan Permasalahan Bangsa” menyatakan bahwa mahasiswa merupakan intelektual muda yang kritis, idealis dan penuh dengan pemikiran-pemikiran. Mahasiswa yang juga

merupakan pemuda, dari sejarah yang ada adalah penggerak perubahan bangsa. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bangsa kita yakni Sumpah pemuda, Proklamasi, Reformasi melibatkan peran pemuda. Peran pemuda dalam menanggapi permasalahan bangsanya sangat penting. Sebagai intelektual muda pemuda diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran serta inovasi baru untuk penyelesaian masalah bangsa.

Arti ideal mahasiswa yang ditulis oleh Maulida dalam artikelnya sungguh tidak selaras dengan realitas mahasiswa dalam yang berjudul “Masalah Mahasiswa dan Sosial”, kesempatan emas ini sungguh terasa sia-sia. Dibutuhkan sebuah wadah yang dapat membentuk karakter mahasiswa menjadi mahasiswa yang ideal seperti halnya yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut M.Hatta yang dimuat (dalam artikel Mahasiswa dan Permasalahan Bangsa, 2014) “tugas perguruan tinggi adalah membentuk insan akademis yang sense of crisis dan selalu mengembangkan dirinya. Insan akademis yang sense of crisis akan sangat peka dan peduli terhadap kondisi bangsanya sehingga mereka mempunyai solusi-solusi untuk masalah tersebut. Insan akademis selalu mengembangkan dirinya yakni mengembangkan hard skill dan soft skill agar tercipta penerus bangsa yang berkualitas dan mampu membawa kemajuan untuk bangsanya.”

Ramadhani (2016) menyatakan “Kebutuhan akan adanya ruang publik dalam kampus menjadi penting apabila dimaknai sebagai ruang yang berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, menumbuhkan budaya demokrasi, aktualisasi diri, dan pengembangan akademik lainnya.” Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 13 ayat (4) menjelaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Sehingga, mahasiswa berhak untuk bebas berekspresi dalam ruang publik yang telah ditentukan.

Ruang publik menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul “Republik tanpa Ruang Publik” adalah Areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan baik permasalahan pribadi maupun kelompok. (Nugroho, 2009, hal.9)

Ramdhani dan Nugroho sama-sama memberikan esensi mengenai Ruang Publik sebagai tempat untuk berinteraksi, bahkan Ramadhani dalam artikelnya yang berjudul “Esensi Ruang Publik di Kampus” mengatakan bahwa ruang publik sendiri dapat menumbuhkan budaya demokrasi. Ini berarti ruang publik sangatlah dibutuhkan dalam membentuk karakter demokratis bagi warga Negara muda atau mahasiswa.

Demokratis sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat demokrasi dan berciri demokrasi. Dalam tatanan mahasiswa sendiri perlu adanya upaya pembentukan karakter demokratis sebagai langkah preventif timbulnya permasalahan yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Kesadaran berdemokrasi dikalangan mahasiswa sudah bukan dalam bentuk penanaman lagi, namun seharusnya sudah dalam tahap pengimplementasian. Jika mahasiswa sebagai warga Negara muda sudah tidak sadar untuk berdemokrasi, dalam artian memiliki kecenderungan menutup diri untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Ini akan menjadi efek domino untuk masa yang akan datang, dikarenakan mahasiswa adalah penerus bangsa dan warga Negara muda yang nantinya akan menjalankan roda kenegaraan.

Ramadhani (2016) bahkan membawa konsep dari Habermas, “pada dasarnya menjadi sebuah hal yang penting bagi sebuah kampus untuk memiliki ruang publik di dalamnya. Bukan saja ruang tak bersekat yang dapat dijadikan tempat berkumpul bagi publik. Melainkan ruang di mana mahasiswa dan birokrat mendapat kesempatan untuk bertatap muka. Ruang di mana mahasiswa dapat menyuarakan isu publik, sementara pihak birokrat menanggapi dengan adanya proses dialektis secara terbuka, transparan, dan tidak ada intervensi.”

Sesuai dengan pernyataan oleh Ramdhani diatas, harapan menjadikan warga Negara muda dalam konteks lingkungan kampus seharusnya bisa menjadi warga Negara yang berintelektual, karena berada dalam lingkungan akademik yang kondusif. Namun disayangkan biasanya sebuah lingkungan akademik sangat minim akan keberadaab sebuah ruang terbuka bebas untuk menyuarakan pendapat. Walaupun ada, keterbatasan menjadi sebuah permasalahan yang membuat mahasiswa sendiri kurang bisa memanfaatkan secara maksimal akan adanya *free public sphere* yang ada di lingkungan kampus mereka.

Dalam sebuah presentasi di Universitas Airlangga Wattimena (2011) menyatakan bahwa “dalam masyarakat demokratis, peran ruang publik amatlah penting. Ruang publik berperan sebagai kontrol sosial, baik kepada penguasa, ataupun pada kepentingan rakyat. Hal ini amat perlu, supaya penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, dan rakyat tidak memaksakan kehendak mayoritasnya, sehingga merugikan kelompok minoritas.”

Sebagaimana pendapat di atas *free public sphere* yang ada di lingkungan kampus biasanya bisa dijadikan untuk berkumpul dan berserikat bagi mahasiswa. Dengan adanya ruang publik, mahasiswa dapat melatih keahlian dan mencari pengalaman semasa di kampus. Dengan adanya *free public sphere*, mahasiswa dapat lebih partisipatif dan produktif dalam menunjukkan keeksistensiannya sebagai mahasiswa.

Kegiatan berserikat di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi ciri bahwa warga Negara muda/ mahasiswa UPI sudah memunculkan budaya demokrasi, terlihat dengan beragamnya aktivitas atau kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa, Kajian bahkan hanya sekedar kumpul-kumpul. Ruang publik di Universitas Pendidikan Indonesia-pun ada beberapa yang sering digunakan tempat berinteraksi maupun berserikat, namun apakah tempat tersebut dapat dijadikan ajang sebagai pembentukan karakter demokratis bagi warga negara muda yang berada di lingkungan kampus UPI.

Ditilik dari pendapat beberapa pendapat, seperti Habermas, Nugroho, dan artikel yang telah dimuat mengenai ruang publik, sebenarnya *Free public sphere* juga dapat menjadi sebuah titik awal untuk menjadikan mahasiswa sadar akan hak dan kewajibannya. Mereka akan mengetahui secara penuh bagaimana menjalankan perannya sebagai warga Negara muda, yang seharusnya sudah sadar akan hak dan kewajibannya. Warga Negara yang dapat diandalkan di masa depan yang bukan hanya menjadi beban Negara.

Oleh karna itu, mahasiswa sebagai generasi muda yang akan menjalankan roda kenegaraan kedepannya dituntut sudah bisa aktif sedari menjadi mahasiswa. Kesadaran ini tentunya tidak akan terlepas dari ketersediaannya sebuah wadah pergerakan bagi mahasiswa sendiri. Wadah pergerakan ini lah yang nantinya akan

menjadi sebuah ruang untuk menjadikan mahasiswa sebagai warga Negara muda yang berkarakter demokratis.

Ditilik dari wadah pergerakan yang tersebar di beberapa tempat di kampus UPI, banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di ruang publik tersebut, bisa ditilik bagaimana ruang publik tersebut menjadikan warga negara terbentuk karakter demokratisnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian yang mengambil judul: **KETERSEDIAAN RUANG PUBLIK DI LINGKUNGAN KAMPUS DALAM UPAYA PEMBENTUKAN WARGA NEGARA MUDA BERKARAKTER DEMOKRATIS.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan ruang publik di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia dalam membentuk warga Negara muda berkarakter demokratis ?
2. Bagaimana respon mahasiswa sebagai warga negara muda di lingkungan kampus dengan adanya ruang publik dalam pembentukan warga Negara muda berkarakter Demokratis ?
3. Bagaimana kendala dari ketersediaan ruang publik di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia dalam kaitannya membentuk Warga Negara Muda berkarakter Demokratis ?
4. Bagaimana kendala dan upaya dari mengatasi kendala dari ketersediaan ruang publik di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia dalam kaitannya membentuk Warga Negara Muda berkarakter Demokratis ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai ketersediaan, kendala, juga mengetahui mengenai ruang publik di lingkungan kampus Universitas Indonesia dalam upaya pembentukan Warga Negara Muda yang berkarakter Demokratis.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan:

1. Ketersediaan ruang publik di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia dalam membentuk warga Negara muda berkarakter demokratis.
2. Respon mahasiswa sebagai warga negara muda di lingkungan kampus dengan adanya ruang publik dalam pembentukan warga Negara muda berkarakter Demokratis.
3. Kendala dan upaya dari ketersediaan ruang publik di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia dalam kaitannya membentuk Warga Negara Muda berkarakter Demokratis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari Segi Teoritis

Dengan diadakannya penelitian oleh peneliti, maka diharapkan hasilnya akan bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan umumnya untuk dijadikan acuan atau referensi dalam upaya pembentukan warga Negara muda berkarakter demokratis dengan ketersediaan ruang publik di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia dan kampus-kampus lainnya.

1.4.2 Manfaat Segi Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam hal kebijakan formal untuk ketersediaan ruang publik di lingkungan kampus.

1.4.3 Manfaat Praktis

Manfaat/ signifikan dari segi praktik meliputi : (a) memberikan informasi mengenai ruang publik atau *free public shpere* bagi masyarakat luas khususnya warga Negara muda di lingkungan kampus; (b) Memberikan pemahaman terhadap warga Negara muda untuk berdemokratis di lingkungan kampus; (c) Meningkatkan kesadaran warga Negara muda untuk bersikap dan bertindak laku secara demokratis.

1.4.4 Manfaat segi isu serta aksi sosial

Hasil penelitian dari segi isu diharapkan memberikan kejelasan mengenai ketersediaan ruang publik di lingkungan kampus dalam upaya membentuk warga Negara muda berkarakter demokratis. Dapat menjadi sebuah wahana efektif dalam

hal pembetulan karakter demokratis bagi warga Negara muda melalui ketersediaan ruang publik di lingkungan kampus.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapaun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.